

## **ABSTRAK**

Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia yang rendah dan penghasilan yang cukup besar di Negara tujuan serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup mereka telah menjadi pemicunya mobilitas tenaga kerja secara Internasional. Selama bekerja di luar negeri para PMI merasa khawatir ditangkap oleh pihak kepolisian, banyak mendapat kecelakaan tidak memperoleh santunan asuransi, berbagai masalah lain muncul pula dalam urusan prosedur, kepemilikan visa, pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua/keluarga, dan alamat asal. Pengaturan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017 di Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Negara asing dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan atau metode yang menggunakan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, menelaah teori-teori hukum, pendapat para sarjana, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI sudah berjalan dengan baik. Kendala yang di hadapi ol BP3TKI Provinsi Jawa Tengah adalah kesalahan yang dilakukan oleh PMI. BP3TKI Provinsi Jawa Tengah sudah berupaya dalam pelatihan PMI serta berkoordinasi dengan PTTKIS dan KBRI di Negara tujuan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia

## **ABSTRACT**

income in the destination country and the desire to improve the welfare of their standard of living have become the trigger for labor mobility internationally. While working abroad the PMI was worried that they would be arrested by the police, many accidents did not receive insurance benefits, various other problems also arose in matters of procedure, ownership of visas, forgery of identity such as age, parent / family name, and address. The regulation on the protection of Indonesian Migrant Workers abroad is regulated in Law number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this study was to find out and analyze legal protection of Indonesian migrant workers who work abroad according to Law number 18 of 2017 in the Central Java Provincial Office of Protection and Placement Services (BP3TKI) and to identify and analyze constraints in the process legal protection for Indonesian Migrant Workers who work in foreign countries from Law Number 18 of 2017 at the Central Java Provincial Office of Placement and Protection Services (BP3TKI).

The approach method used in this study is a normative juridical approach, namely an approach or method that uses secondary data sources, namely invitational regulations, examines legal theories, scholars' opinions, concepts, principles, and legislation related to this research.

The results showed that legal protection against PMI had gone well. The obstacle faced by BP3TKI in Central Java Province was a mistake made by PMI. BP3TKI in Central Java Province has been working in PMI training and coordinating with PTTKIS and the Indonesian Embassy in the destination country.

**Keywords:** Legal Protection, Indonesian Migrant Workers